

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tingkat transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara telah menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penggunaan basis akrual, serta keterbukaan informasi melalui situs resmi pemerintah (PPID). Meskipun demikian, secara substansi transparansi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan belum optimalnya partisipasi publik dalam mengakses serta memahami laporan keuangan daerah.
2. Transparansi LKPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi keuangan mendorong peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan anggaran secara tepat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik serta opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang pada tahun 2023 berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pengaruh ini masih belum sepenuhnya efektif karena rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat secara langsung.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi LKPD Kabupaten Nias Utara meliputi:
  - Regulasi pemerintah, seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang menjadi dasar pelaporan keuangan berbasis akrual dan pengelolaan keuangan berbasis kinerja.
  - Teknologi keuangan, yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung akses informasi publik.
  - Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntansi

pemerintahan yang masih terbatas.

- Pengawasan oleh DPRD, Inspektorat, dan BPK, yang turut mendorong keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Partisipasi publik dan LSM, yang masih pasif dan belum terfasilitasi secara maksimal oleh pemerintah daerah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya transparansi yang substantif, dengan menyederhanakan bahasa dan format LKPD, memanfaatkan teknologi informasi yang lebih interaktif, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami laporan keuangan.
2. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam hal penguasaan standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi keuangan, guna menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
3. Peran DPRD, Inspektorat, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat, baik melalui pelatihan, diskusi publik, maupun akses data keuangan yang terbuka, untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan berimbang.
4. Optimalisasi sistem informasi keuangan daerah berbasis digital, seperti SIMDA atau SIPD, penting dilakukan agar informasi keuangan dapat lebih mudah diakses, diaudit, dan diawasi oleh publik serta lembaga pengawas.
5. Pemertahanan opini WTP dari BPK harus menjadi prioritas berkelanjutan, melalui tindak lanjut atas temuan audit, pengendalian internal yang lebih kuat, serta pelaporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas.